

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Putri dan Putra, 2017). Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Pajak merupakan sumber pendapatan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk negara yang terbesar, yaitu 1.489,3 Triliun Rupiah (84,5 persen) dari total pendapatan mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang mengubah

tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan merupakan obyek pajak dalam PPh Pasal 21.

Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Putri dan Putra, 2017).

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan negara 1.761,6 triliun rupiah dalam APBN-P 2015 (www.kemenkeu.go.id). Penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (RAPBN 2014).

Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat

mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal. Selain dituntut untuk membayar pajak sebagai kewajiban, perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia juga diharuskan untuk menerapkan *corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan disebut *corporate governance*.

Komponen beban bunga akan mengurangi perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Putri dan Putra, 2017).

Prinsip utama untuk tata kelola perusahaan yang baik harus didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. Bahkan, kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dibuat pada semua hal yang material mengenai korporasi, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Selain itu, struktur kepemilikan juga dapat digunakan untuk mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan efektivitas monitoring kinerja manajemen. Investor institusional merupakan pemegang saham yang berbentuk institusi, seperti Perusahaan Asuransi, Bank atau Institusi lain. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi oleh institusional investor akan lebih mengoptimalkan efektivitas pengawasan aktivitas

manajemen karena besarnya dana yang ditanamkan oleh mereka (Putri dan Putra, 2017).

Riset gap yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Pada variabel *leverage*, hasil penelitian Rani, dkk (2018) serta Putri dan Putra (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian Faizah dan Adhivinna (2017) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Demikian halnya dengan variabel beban iklan, hasil penelitian Fatmawati dan Solikin (2017) serta Khan, dkk (2017) menunjukkan bahwa beban iklan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian Hanny dan Niandari (2018) menunjukkan bahwa beban iklan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya pada variabel proporsi kepemilikan institusional, hasil penelitian Putri dan Putra (2017), Ngadiman dan Puspitasari (2016) serta Khan, dkk (2017) menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian Faizah dan Adhivinna (2017) menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Putri dan Putra (2017) yang berjudul pengaruh *leverage*, *profitability*, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Putri dan Putra (2017) yaitu pertama, penambahan variabel independen yaitu variabel beban iklan. Beban iklan ditambahkan sebagai variabel penelitian

karena semakin tinggi beban iklan pajak yang dikeluarkan semakin besar sehingga mendorong manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Perbedaan kedua yaitu pada periode penelitian, pada penelitian Putri dan Putra (2017) periode penelitian adalah 2013-2015, sedangkan dalam penelitian ini periode penelitiannya adalah 2013-2017.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH *LEVERAGE*, BEBAN IKLAN DAN PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2013-2017”**.

1.2 Ruang Lingkup

Agar permasalahan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, maka perlu adanya pembatasan masalah yang berguna untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian. Maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti secara garis besar membahas mengenai *leverage*, beban iklan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2013-2017. Maka dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Periode penelitian ini adalah selama lima tahun dari periode 2013 sampai 2017.

2. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, variabel dependen sebagai berikut:

- a. Variabel independen: *leverage*, beban iklan dan proporsi kepemilikan institusional.
- b. Variabel dependen: *tax avoidance*.

3. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2013-2017.

1.3 Perumusan Masalah

Tax avoidance merupakan suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak namun masih dianggap legal. Fenomena menunjukkan bahwa persentase pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2017 yang sebesar 91,31% merupakan pencapaian yang terendah dari dua tahun sebelumnya yakni 2015 sebesar 99,45% dan 2016 sebesar 96,88%. Rendahnya tingkat realisasi penerimaan terhadap target penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Banyak faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain *leverage*, beban iklan dan proporsi kepemilikan institusional. Hasil penelitian Putri dan Putra (2017) menunjukkan bahwa *leverage* dan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Demikian halnya dengan hasil penelitian Fatmawati dan Solikin (2017) menunjukkan bahwa beban iklan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan permasalahan di atas maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2013-2017?
2. Apakah beban iklan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2013-2017?
3. Apakah proporsi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2013-2017?
4. Apakah *leverage*, beban iklan dan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2013-2017?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2013-2017.
2. Menguji pengaruh beban iklan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2013-2017.
3. Menguji pengaruh proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2013-2017.

4. Menguji pengaruh *leverage*, beban iklan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2013-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang penelitian terkait perkembangan ilmu manajemen keuangan khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini menjadi sebuah bukti empiris yang akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *leverage*, beban iklan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan untuk tambahan informasi bagi perusahaan mengenai pengaruh *leverage*, beban iklan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.